

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI ALTERNATIF PENANAMAN NILAI MORAL DALAM KEBERAGAMAN

Rosita Endang Kusmaryani
Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract. *One of the relevant issues to current condition is the diversity in society. This is the result of mobility and information stream which develops more and more rapidly. Foreign cultural values flow into the society, following the stream and give positive as well as negative impacts.*

This condition of diversity is often assumed as a threat for the unity of nation and state. Oftentimes, certain rules and regulations made as the responds to the diversity turn out to be a facility for the majority culture to dominate. The slogan of “Bhinneka Tunggal Ika” (unity in diversity) as an inheritance of the New Order era constitutes the case which shows how multi-cultures was incorrectly managed by disregarding multiculturalism itself. An assumption that diversity will endanger the wholeness of our nation becomes the reason to force the diversity be kept in an integrity and unity, which eventually leads to the existence of monoculturalism.

Domination of the majority culture, the legacy from incorrect perception and management of Bhinneka Tunggal Ika in the past gives impact to various aspects of life in the present Indonesian society. The lack of comprehensive understanding for multiculturalism even causes moral decadence of the young generation. Such merits as togetherness, appreciation and respect to others, and mutual cooperation are vanishing. The arrogance due to domination of majority culture causes lack of understanding in interactions with other cultures or other people.

This condition turns to become a challenge for education milieu to give more orientation to multicultural understanding. Schools, through the teaching-learning process, need to emphasize that diversity is a potential wealth and worth understanding, and should not be considered a negative aspect. Multicultural education is expected to be the solution for the problems of national moral degradation.

Key words: *diversity, multiculturalism, majority culture*

PENDAHULUAN

Kata kunci istilah multikultural adalah kebudayaan. Meskipun istilah itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan, tetapi tampaknya ada semacam kesepakatan bahwa kebudayaan merupakan bahasa, sejarah, kepercayaan, nilai moral, asal-usul geografis dan segala sesuatu yang khas dimiliki oleh kelompok (Pradipto, 2005: 15).

Kebudayaan tentu saja berbeda antara kelompok satu dengan yang lain dengan ciri khasnya masing-masing.

Salah satu isu yang relevan untuk kondisi akhir-akhir ini adalah adanya keberagaman (*diversity*) di dalam masyarakat. Keberagaman tampak pada adanya beberapa perbedaan seperti misalnya usia, ras, etnis, jender maupun orientasi seksual (Capuzzi, 1997: 37). Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan masyarakat yang *multicultural, multiracial dan multilingual*. Hal ini sebagai akibat dari adanya arus mobilitas dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat. Apalagi mengingat globalisasi yang memberikan konsekuensi terciptanya dunia tanpa tapal batas. Hubungan antar negara, antar daerah, antar budaya bahkan antar individu begitu mudah. Nilai-nilai budaya dari luar tentu saja mengalir mengikuti arus tersebut dan memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Kondisi keberagaman ini seringkali dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara. Munculnya fragmentasi dan diferensiasi yang tidak terelakkan dikhawatirkan dapat menyebabkan lemahnya integritas nasional. Ketika kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang mandiri, utuh, murni, citra yang terbangun pada akhirnya adalah sebuah pluralitas budaya yang terpisah satu sama lain (Hanum, 2002) Pada gilirannya, cara tersebut membentuk sebuah pengukuan terhadap keterpisahan budaya. Hal yang sering terjadi adalah pengaturan sebagai respon atas keberagaman sering menjadi arena dominansi kebudayaan mayoritas. Akhirnya respon tersebut terjebak dalam bentuk monokulturalisme. Slogan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan Orde Baru merupakan kasus yang menggambarkan pengelolaan multikultural yang mengabaikan pemahaman multikultural itu sendiri. Otoritas nasional muncul sebagai pengatur budaya yang dominan (Pradipto, 2005: 15). Adanya anggapan bahwa keberagaman akan membahayakan keutuhan negara menjadi alasan membuat keberagaman itu harus tetap berada dalam keutuhan, kesatuan yang akhirnya justru mendorong munculnya monokulturalisme.

Dominansi kebudayaan mayoritas, warisan dari persepsi dan pengelolaan Bhinneka Tunggal Ika yang kurang tepat di masa lalu berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kurangnya pemahaman multikultural yang komprehensif justru menyebabkan degradasi moral generasi muda. Sikap dan perilaku yang muncul seringkali tidak simpatik, bahkan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya luhur nenek moyang. Sikap-sikap seperti kebersamaan, penghargaan terhadap orang lain, kegotongroyongan mulai pudar. Adanya arogansi akibat dominansi kebudayaan mayoritas menimbulkan kurangnya pemahaman dalam berinteraksi dengan budaya maupun orang lain.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk lebih mengorientasikan pada pemahaman multikultural. Sekolah yang memiliki peran strategis dalam penanaman nilai-nilai moral bangsa memiliki bertanggung jawab akan upaya tersebut. Sekolah melalui proses pengajaran perlu menekankan dan menanamkan bahwa keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang pantas untuk dipahami secara komprehensif. Adanya keberagaman perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda mampu memiliki paradigma berpikir yang lebih positif dalam memandang sesuatu yang "berbeda" dengan dirinya. Harapannya adalah terbangunnya sikap dan perilaku moral yang simpatik. Pendidikan multikultural diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan degradasi moral bangsa.

PEMBAHASAN

Persepsi Keberagaman dalam Pemahaman Multikultural

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1989 : 193). Kebudayaan seringkali juga mempunyai pengertian sebagai hasil dari cipta, rasa dan karsa. Istilah peradaban sering juga digunakan untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa dan sistem kenegaraan.

Perubahan di dalam masyarakat sebagai akibat globalisasi memungkinkan adanya keberagaman yang tidak terelakkan. Konsekuensinya selain terciptanya masyarakat yang *multiethnic* dan *multilingual*, juga terciptanya masyarakat yang multikultural (*cultural society*). Masyarakat menjadi heterogen dalam hal kebudayaan. Kebudayaan tersebut berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Multikulturalisme merujuk pada tiga hal. Pertama, multikulturalisme berkenaan dengan budaya. Kedua, merujuk pada keberagaman budaya. Ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon atas keberagaman tersebut (Pradipto, 2005: 15). Tiga hal tersebut menjadi sentral ketika membicarakan mengenai istilah multikultural.

Sebenarnya keanekaragaman budaya yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia telah disadari dan dikenal sejak nenek moyang. Nilai-nilai luhur telah mewatak di antara anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai moral ketimuran yang dapat dibanggakan. Adanya sikap gotong royong, saling menghargai satu sama lain, mendahulukan kepentingan bersama dan kebersamaan merupakan pola perilaku yang mendarah daging kala itu.

Keanekaragaman budaya Indonesia kemudian dikukuhkan di dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintahan Orde baru bahkan menanamkan slogan Bhinneka Tunggal Ika dengan persepsi yang kurang tepat. Keragaman yang pada hakekatnya perlu adanya pemahaman multikultural justru dibelokkan dengan munculnya monokultural. Keberagaman tersebut diharapkan tetap berada dalam satu keutuhan dan kesatuan. Untuk itu adanya keberagaman itu sendiri menjadi kabur. Dalam hal ini, ada tarik-menarik kekuatan monokulturalisme dan multikulturalisme dalam konteks pengelolaan negara. Kesatuan, di satu sisi diperlukan sebagai kekuatan dalam pengelolaan negara dan sebagai identitas nasional. Keberagaman, di sisi yang lain dapat membentuk negara. Monokulturalisme muncul dari kebutuhan untuk mempersatukan budaya yang berbeda. Multikulturalisme justru semakin kuat dengan mengedepankan kepentingan masing-masing budaya lokal.

Warisan Orba tersebut mengakibatkan munculnya kebudayaan mayoritas. Kebudayaan yang dimiliki kelompok mayoritas akan mendominasi posisi pemegang otoritas, sementara pemahaman akan budaya yang lain menjadi kurang. Ketika setiap kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang mandiri, utuh, murni dan citra yang terbangun pada akhirnya adalah sebuah pluralitas budaya yang terpisah satu sama lain (Hanum, 2002: 3). Kurangnya pemahaman budaya lain mengakibatkan sikap arogan terhadap kebesaran budayanya dan menganggap budaya lain sebagai

pesaing atau ancaman. Sikap arogan yang sering terjadi dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas.

Hambatan dalam pemahaman keragaman seringkali menjadi kendala dalam pemahaman multikultural secara komprehensif. Menurut Dejanasz (2002: 148), ada beberapa hambatan dalam menerima keragaman.

1. **Prasangka**, yaitu sikap negatif terhadap orang lain berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu.
2. **Kesukuan**, yaitu suatu kecenderungan superioritas yang berkaitan dengan kelompok budaya atau bangsa. Hal ini juga terjadi yang berkaitan dengan agama atau organisasi politik.
3. **Stereotype**, yaitu suatu keyakinan kelompok yang diterapkan secara universal terhadap semua anggota kelompok.
4. **Menyalahkan korban**, yaitu membuat atribusi sebab yang tidak benar. Kadang-kadang hal ini dilakukan karena adanya keyakinan yang secara umum dimiliki oleh kebanyakan orang.
5. **Diskriminasi**, yaitu hambatan individu pada keanggotaan organisasi atau suatu pekerjaan yang disebabkan keanggotaannya pada kelompok tertentu.
6. **Gangguan**, yaitu perlakuan jelek baik secara verbal maupun fisik seorang individu karena keanggotaan pada kelompok tertentu.
7. **Pelecehan seksual**, mendekati seseorang dengan cara yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, secara intim mengganggu produktivitas dan kemajuan seseorang.
8. **Reaksi negatif**, yaitu reaksi untuk menghindari kekuatan dan pengaruh oleh anggota kelompok tertentu yang menyebabkan ketakutan dan kemarahan.

Hambatan-hambatan, seperti disampaikan di atas kadang-kadang dilakukan oleh kebanyakan orang, baik disadari maupun tidak. Tidak disadarinya sikap atau perilaku-perilaku tersebut karena memang kurang adanya pemahaman akan keberagaman yang terjadi di sekitar. Hal yang terjadi justru “keseragaman” telah menginternalisasi dalam sikap dan perilaku, sehingga ketika dihadapkan dengan adanya keberagaman mengalami hambatan.

Pendidikan Multikultural sebagai Alternatif Solusi

Isu keberagaman perlu ditanggapi sebagai faktor positif, justru bukan sebagai ancaman. Adanya heterogenitas yang muncul di masyarakat saat ini menjadi kekayaan yang perlu dihargai dan dilestarikan. Pemikiran ini tentu saja tidak akan dapat berjalan mulus tanpa ada upaya pembudayaan paradigma tentang keberagaman. Perubahan budaya tampaknya dimulai dari sekolah (Yoseph Dedy Pradipto, 2005). Hal ini mengingat sekolah memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran, selain keluarga dan masyarakat. Keberagaman dalam pendidikan ada karena pendidikan tidak lepas dari konteks masyarakat. Meskipun demikian, bukan

berarti keluarga dan masyarakat dapat melepaskan tanggung jawab dalam upaya perubahan budaya yang diharapkan.

Pendidikan multikultural merupakan serangkaian konsep, petunjuk tingkah laku dan arena yang secara resmi diformulasi melalui kurikulum, regulasi, metode pembelajaran, kemampuan guru, hubungan antar sekolah dan masyarakat dalam istilah multikulturalisme. Pendidikan yang mengedepankan isu keberagaman dalam masyarakat menjadi inti dari pendidikan multikultural. Pendidikan ini lebih menekankan pada penanaman moral dibandingkan dengan pola-pola pendidikan birokratis yang lebih mengorientasikan pada tampilan kecerdasan pikiran.

Pendidikan multikultural dipandang sebagai proses belajar alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal. Kebijakan otonomi pendidikan mendukung upaya yang mengedepankan kepentingan dan keberagaman lokal. Tantangan bagi pendidikan justru muncul ketika dihadapkan pada upaya mempertahankan keutuhan negara. Sekolah seringkali menjadi alat bagi dominasi otoritas nasional yang memikul beban untuk menjaga integrasi bangsa melalui pengajaran. Adanya kurikulum nasional dan standarisasi ujian merupakan contoh konkrit dari kasus tersebut. Hal itu berangkat dari asumsi bahwa keberagaman harus tetap berada dalam keutuhan dan kesatuan, yang pada akhirnya memunculkan monokulturalisme.

Persepsi yang kurang tepat mengenai keberagaman menjadi agenda pendidikan untuk mengoreksinya melalui pembenahan proses pembelajaran. Persepsi adanya keberagaman perlu ditanamkan tidak untuk disatukan dalam keseragaman, namun dimaknai sebagai kekayaan. Selanjutnya kekayaan itu diketahui dan dipelajari dengan pemahaman.

Penanaman Nilai Moral dalam Pendidikan Multikultural

Nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan (Efianingrum, 2002: 34). Dalam hal ini mencakup nilai moral yang mengatur aturan-aturan dalam kehidupan bersama. Moral itu sendiri mengalami perkembangan yang diawali sejak dini. Perkembangan moral seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian dan sosial anak (Haditono, 2000: 168). Untuk itu, pendidikan moral sedikit banyak akan berpengaruh pada sikap atau perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain.

Perkembangan moral menurut teori Kohlberg (Haditono, 2000: 171) melalui enam stadium. **Stadium satu**, menurut untuk menghindari hukuman. **Stadium kedua**, anak bersikap konformistis untuk memperoleh hadiah, untuk dipandang baik. **Stadium ketiga**, anak bersikap konformistis untuk menghindari celaan dan untuk disenangi orang lain. **Stadium keempat**, anak bersikap konformistis untuk menghindari hukuman yang diberikan bagi beberapa tingkah laku tertentu dalam kehidupan bersama. **Stadium kelima**, konformitas sekarang dilakukan karena menginginkan kehidupan bersama yang diatur. **Stadium keenam**, melakukan konformitas tidak karena perintah atau norma dari luar, melainkan karena keyakinan sendiri ingin melakukannya.

Dalam membentuk perilaku moral seseorang, proses-proses belajar memegang peranan penting. Untuk itu, pengaruh lingkungan sebagai tempat melakukan proses belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral. Lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat ikut memberikan kontribusi yang pantas diperhitungkan. Lingkungan sekolah, terutama, menjadi institusi sentral yang diharapkan dapat memberikan pendidikan moral. Pada kenyataannya, ada semacam kecenderungan bahwa institusi sekolah terjebak dengan birokrasi persekolahan dan birokrasi kehidupan. Birokrasi tersebut melumpuhkan dan bahkan mematikan alam pikiran merdeka individu dan masyarakat organisasi. Pendidikan moral dan pembentukan moral tidak lagi menjadi komitmen. Orientasi dan perilaku moral dikesampingkan digantikan oleh kecerdasan pikiran, keahlian dan berbagai perilaku tampil di lapisan luar (Suyata, 2005: 4).

Kondisi tersebut bukan berarti pendidikan nilai-nilai moral mustahil untuk dilakukan di institusi sekolah. Pendidikan nilai di sekolah justru diupayakan semaksimal mungkin, meskipun sulit dilakukan. Hal itu mengingat, nilai-nilai moral akan keberagaman sudah mengalami krisis yang berkepanjangan. Untuk itu diperlukan dukungan keluarga dan masyarakat yang besar. Sekolah, keluarga dan masyarakat memikul tanggung yang sama untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan nilai moral.

Dalam pendidikan multikultural, nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan perlu ditanamkan. Sikap superioritas yang justru menghambat pemahaman akan keberagaman perlu dihilangkan. Hal ini seringkali terkait dengan kesukuan, ras, agama, jender dan sebagainya. Kelompok tertentu diharapkan tidak merasa lebih tinggi dari kelompok lain. Untuk itu, kerja belajar kooperatif dan kolaboratif dikembangkan secara aktif dalam memberikan kesadaran akan kesetaraan dan kebersamaan tersebut. Kerja belajar seperti itu akan membiasakan untuk berinteraksi dengan kelompok lain yang memiliki perbedaan. Seseorang akan berupaya bagaimana menyelesaikan tugas-tugas belajar untuk mencapai tujuan yang sama, meskipun dari kelompok yang berbeda-beda. Kondisi ini memaksa seseorang untuk lebih memahami kelompok lain maupun orang lain agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Kesadaran nilai kemanusiaan juga menjadi hal yang penting. Perlunya pemahaman akan adanya eksistensi manusia secara utuh. Memahami manusia dengan keberadaanya perlu menyadari bahwa manusia memiliki kemerdekaan yang perlu dihargai. Untuk itu, semua yang ada dalam diri manusia penting untuk dipahami ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Cara berpikir demikian akan memberikan konsekuensi munculnya perilaku interaktif yang positif. Perilaku tersebut seperti misalnya penghargaan terhadap orang lain, kesediaan untuk bergotong royong, tidak menghakimi orang lain, empati dan sebagainya. Perilaku moral yang demikian tampaknya perlu dijaga dan dilestarikan.

Menanamkan nilai-nilai moral dalam keberagaman, sekali lagi bukan hal mudah seperti membalik tangan. Penanaman nilai-nilai moral memerlukan suatu proses dan upaya yang tidak sedikit. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam pemahaman keberagaman.

1. Mengurangi prasangka. Dalam hal ini perlu mengenal adanya keberagaman dan belajar untuk menilai dan menghargai perbedaan-perbedaan fundamental.
2. Mengurangi penggunaan *stereotype*. Langkah ini dilakukan dengan menguji *stereotype* dan perilaku yang merefleksikan pandangan tentang orang lain, menganalisa perasaan dan mengembangkan perencanaan perubahan mengenai bias.
3. Meminimalkan *miscommunication* dengan orang lain yang memiliki perbedaan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan berlatih ketrampilan komunikasi misalnya ketrampilan mendengar, menginterpretasi bahasa non verbal, mengirim dan menerima pesan dan sebagainya.
4. Membangun hubungan dengan orang lain yang memiliki perbedaan. Mencari kesempatan berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang beragam merupakan langkah yang proaktif. Selanjutnya langkah ini diwujudkan dengan membangun hubungan yang positif dengan orang lain.

PENUTUP

Isu keberagaman di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Hal itu kemudian dikukuhkan dengan adanya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Persepsi yang keliru dalam memaknai arti keberagaman, menimbulkan degradasi moral generasi muda. Keberagaman dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan dan kesatuan bangsa. Dominansi kebudayaan mayoritas menjadi konsekuensi dari kekeliruan tersebut, yang selanjutnya menimbulkan monokulturalisme.

Pendidikan multikultural menjadi tuntutan untuk menanamkan nilai-nilai moral akan keberagaman. Pendidikan multikultural, meskipun sulit diterapkan karena nilai-nilai moral akan keberagaman sudah mengalami krisis, namun perlu diterapkan. Penanaman nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan dalam keberagaman mewarnai pengajaran dalam pendidikan multikultural. Pengurangan sikap-sikap prasangka, pengurangan penggunaan *stereotype*, meminimalkan kesalahan komunikasi dan mengambil kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang "berbeda" merupakan upaya menanamkan nilai-nilai moral dalam pemahaman keberagaman. Dengan demikian, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan degradasi moral bangsa yang diakibatkan pengaruh keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Capuzzi, D. & Gross, D.R. 1997. *Introduction to The Counseling Profession*. Second Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Dejanasz, S.C., Dowd K.O. & Schneider, B.Z. 2002. *Interpersonal Skill in Organizations*. Boston : McGraw-Hill.
- Hanum, F. 2002. Peran Sekolah dalam Membudayakan Nilai Pluralisme dan Kemanusiaan untuk Membangun Kebersamaan. *Dinamika Pendidikan*. No. 1/Th IX Maret 2002.
- Koentjaraningrat. 1989. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara baru
- Haditono. S.R. 2000. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyata. 2005. *Membangun Indonesia Baru dengan Keseimbangan Identitas Nasional dan Etnis Religius dalam Dinamika Global*. Makalah Seminar Nasioanl dalam Rangka Dies Natalis UNY ke-41 tanggal 28 Mei 2005.
- Pradipto. Y.D. 2005. Pemahaman Multikultural dan Pendidikan Multikultural. *Kompas*. Minggu, 20 Maret 2005.